BADAN PUSAT STATISTIK SEKRETARIS UTAMA BIRO UMUM DASAR HUKUM 1. Undang-undering Republik Indonesia Norro: 171 min. 2003 tentang Keungan Negara 2. Undang-undering Republik Indonesia Norro: 171 min. 2003 tentang Keungan Negara 3. Peraturan Penerintah Norro: 27 min. 2004 tentang Perbendahanan Negara 3. Peraturan Penerintah Norro: 27 min. 2004 tentang Perbendahanan Negara 3. Peraturan Penerintah Norro: 27 min. 2005 tentang Sebanah Statistik 4. Peraturan Penerintah Norro: 27 min. 2005 tentang Sebanah Statistik 5. Peraturan Penerintah Norro: 17 min. 2005 tentang Sebanah Natas Peraturan Nenerintah Norro: 27 Tahun 2003 tentang Perbendahanan Negara 2. Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Sebanah Pusat Statistik 6. Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Peraturan Menterin Keungan Norro: 181PKM G502016 tentang Penubahan Atas Pera								
BADAN PUSAT STATISTIK SEKRETARIS UTAMA BIRO UMUM DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Peterbendaharaan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Febrendaharaan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Febrendaharaan Negara 3. Peraturan Penerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara 4. Peraturan Penerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Febrendaharaan Negara 5. Peraturan Penerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menderi Keuangan Nomor 215/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menderi Keuangan Nomor 215/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menderi Keuangan Nomor 215/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menderi Keuangan Nomor 215/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menderi Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menderi Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Peraediaan 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menderi Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Peraediaan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Peraediaan 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Peraediaan 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Peraediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Peraediaan 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Peraedian Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Perubahan Peraediaan 11. Peraturan Kepala Badar Pusas Statisik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraedian Nomor 115/PMK 05/2016 tentang Peraedian Nomor 1		NOMOR SOP	SOP-005/02500/2022					
BADAN PUSAT STATISTIK SEKRETARIS UTAMA BIRO UMUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2031 sentang Keuangan Negara 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2031 sentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2031 sentang Perbendaharaan Negara 3. Persuturan Peseden Nomor 68 Tahun 2007 sentang Badan Pusat Statistik 4. Persuturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perpebahan Atlan Persuturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perpebahan Atlan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 215PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintahan 6. Persuturan Menteri Keuangan Nomor 215PMK 052016 iertang Persuturan Menteri Keuangan Nomor 215PMK 052016 iertang Persutusahan Persedianan Persedianan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintahan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintahan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintahan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintahan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintahan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintah Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Pemerintahan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri Keuangan Nomor 115PMK 052016 iertang Persuturan Persuturan Persuturan Menteri K		TGL. PEMBUATAN	25 Juli 2022					
BADAN PUSAT STATISTIK SEKRETARIS UTAMA BIRO UMUM DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Pereintian Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Peraturan Penerintian Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Peraturan Penerintian Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Peraturan Penerintian Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penerintian Sharang Nilik Negara/Daerah 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK 05/2016 tentang Petubahan Pe		TGL. REVISI	8 Agustus 2022					
BADAN PUSAT STATISTIK SEKRETARIS UTAMA BIRO UMUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Peraturan Manang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 1. Peraturan Persiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Republikan Pusat Statistik 1. Peraturan Persiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 1. Peraturan Persiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 1. Peraturan Persiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 1. Peraturan Persiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 1. Peraturan Persiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perpendian Barang Milik Negara Daerain 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215FMK.052018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215FMK.052018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Barang Milik Negara 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Barang Milik Negara 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Barang Milik Negara 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Barang Milik Negara 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Barang Milik Negara 1. Peraturan Kenteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Barang Milik Negara 1. Mengelahul tusas dan funganja serta peraturan dan prosedur-prosedur Andrea dan Pusat Statistik Nomor 115FMK.052018 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Persediaan 1. Peraturan Kenteri Legandah Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2001 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Peratubahan Persediaan Persediaan Persediaan Persediaan Menteri Keuangan Nomor 115FMK.052018 tentang Persediaan Persediaan Persediaan Persediaan Persediaan Persediaan Per		TGL. EFEKTIF	18 Agustus 2022					
Agus Gede Hendrayana Hermawan, S.E., M.Si. NAMA SOP Alur Distribusi Barang Persediaan Dengan Cara Transfer DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Persiden Nomor 88 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 5. Peraturan Persiden Nomor 88 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendenahan Alas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 16/PMK 05/2016 tentang Pedeman Pendenahan Pendenahan Alas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 16/PMK 05/2016 tentang Pedeman Pendenahan Persediaan 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK 05/2016 tentang Pedeman Pendenahan Persediaan 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK 05/2021 tentang Pedeman Pendenahan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK 05/2021 tentang Pedeman Pendenahan Persediaan 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PBI/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 13. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pemakiain 14. SOP Paraga Persediaan Masuk Dengan Cara Pemakiain 15. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pemakiain 16. Peraturan Menteri Keuangan Persediaan 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Dengan Pendanahan Persediaan 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasio		DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Umum					
DASAR HUKUM	BADAN PUSAT STATISTIK							
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik Negara Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Statistik Negara Peraturan Negara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Statistik Negara Nomor 181/PMK 05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 05/2015 tentang Pedaksanaan Statistik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK 05/2021 tentang Pedaksanaan Statistik Negara Negara Nomor 171/PMK 05/2021 tentang Pedaksanaan Statistik Negara Negara Negara Nomor 171/PMK 05/2021 tentang Pedaksanaan Statistik Negara Ne			Agus Gede Hendrayana Hermawan, S.E., M.Si.					
1. Urdang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedahararan Negara 3. Peraturan Persiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 05/2018 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 05/2018 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 05/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK 05/2012 tentang Peladoman Penatausahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK 05/2021 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 14. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 15. SOP Alur Barang Persediaan Negaran Persediaan 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Persediaan P								
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertbendaharaan Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2016 tentang Penarintah Pusat 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2016 tentang Penarintah Pusat 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2016 tentang Penarintah Pusat 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penatusahaan Persediaan 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Menteri Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 97 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Menteri Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 97 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 13. Peraturan Menteri Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 97 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 14. SOP Pasat Barang Persediaan Pusat Statistik Nomor 97 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Persediaan Penyusunan Standar Operasional Persediaan 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Persediaan Penyusunan Standar Operasional Persediaan 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 18. Peraturan Menteri Ke		KUALIFIKASI PELAKSAN	A					
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Permeintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Baerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Peraturan Menterin Keuangan Nomor 15/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.06/2016 tentang Perubahan Barang Milik Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.06/2016 tentang Pentausahaan Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik **EETERKAITAN** **ERRAITAN** **PERALATAN/PERLENGKAPAN** 1. PC/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. SOP Alur Barang Persediaan Mesuk Dengan Cara Pembelian 4. Mengetahui tugas dan fungsings eath peraturan den prosedur-prosedur yang terkait dengan nemerintah dengan balik Auntansi Persediaan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Persediaan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peruba		· ·						
4. Mengetahui tugas dan fungsinya serta peraturan dan prosedur-prosedur yang terkait dengan Dengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Pemerintah Pusat 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Penatausahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Penatausahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2012 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 13. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 14. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pembelian 15. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 16. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 17. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 18. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 18. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 19. Mem		· ·						
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Penatusahanan Barang Milik Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahanan Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahanan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. PC/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pembelian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 5. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 4. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 5. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 6. Jariangan Tingkat Instansi 6. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 7. Memahami dan mampu mengo			3. Mengetahui mekanisme pengelolaan gudang persediaan					
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2016 tentang Penatusahaan Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2020 tentang Penatusahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 13. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 14. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 15. PERINGATAN 16. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 16. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 17. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 18. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 18. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 18. Memahami dan mampu mengoperasionalkan PC/Laptop 19. Memahami dan mampu mengoperasionalkan Pcala peratura peraturan peraturan peraturan peraturan	4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang							
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1131/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1131/PMK.05/2021 tentang Pedaman Penatausahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pedaman Penatausahaan Persediaan 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Persediaan Pengatusahan Persediaan Pengatusahan Persediaan Pengatusahan Persediaan Pengatusahan Persediaan Pengatusahan Penga								
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. PC/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. Printer 4. Kartu Kendali Barang Persediaan 4. Kartu Kendali Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI		5. Memahami dan mamp	u mengoperasionalkan PC/Laptop					
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 13. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 14. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 15. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 16. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Persediaan Masuk Dengan Cara Pemakaian 18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Persediaan Masuk Dengan Cara Pemakaian 19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Persediaan Masuk Dengan Cara Pemakaian 19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Persediaan Masuk Dengan Cara Pemakain 19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Persediaan dan Aplikasi Sakti Mendali Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi Sakti Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi Sakti Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi Sakti Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi Sakti Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan								
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Proseduran Ketala Barang Persediaan 13. Pinter 14. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pembelian 25. Pilling Cabinet 26. Jairngan Internet 15. Filling Cabinet 26. Jairngan Internet 16. PENCATATAN DAN PENDATAAN 17. PERINGATAN 18. SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan 18. Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI								
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN KETERKAITAN 1. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI								
(SAKTI) 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan dan Aplikasi SAKTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN 1. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. PC/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Kartu Kendali Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI								
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN 1. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 4. Kartu Kendali Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik KETERKAITAN 1. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI								
KETERKAITAN 1. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan 2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 4. Kartu Kendali Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI								
2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 4. Kartu Kendali Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI		PERALATAN/PERLENGKAPAN						
2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian 3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI	1. SOP Proses Umum Penatausahaan Persediaan	1. PC/Laptop						
3. SOP Alur Barang Persediaan Keluar Dengan Cara Pemakaian 4. SOP Alur Pelaporan Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI	2. SOP Alur Barang Persediaan Masuk Dengan Cara Pembelian							
4. Kartu Kendali Barang Persediaan 5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI		,						
5. Filling Cabinet 6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI			Persediaan					
6. Jaringan Internet PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI	J 3	•						
PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI								
Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan barang persediaan tidak berjalan dengan baik dan akan Pencatatan Barang Persediaan pada Kartu Kendali Barang Persediaan dan Aplikasi SAKTI	PERINGATAN	•	DATAAN					

^{*}Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

			Pela								
		Satker Penerima			Satker Pengirim			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Tim Layanan Gudang/Bagian Umum/ Subbagian Umum	Tim Laporan Persediaan (Operator)	Tim Laporan Persediaan (Approver)	Tim Layanan Gudang/Bagian Umum/ Subbagian Umum	Tim Laporan Persediaan (Operator)	Tim Laporan Persediaan (Approver)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengirim barang persediaan ke satuan kerja lain							Surat Jalan/ Dokumen Pengiriman Lainnya	1 minggu	Barang yang terkirim	-
2	Memeriksa barang persediaan berdasarkan dokumen pengiriman (surat jalan/delivery order/lainnya), bila terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen pengiriman maka isian dokumen pengiriman disesuaikan dengan yang diterima							Surat Jalan/ Dokumen Pengiriman Lainnya	1 jam	Surat Jalan/ Dokumen Pengiriman Lainnya	-
3	Menandatangani dokumen pengiriman, menyimpan 1 (satu) rangkap dokumen pengiriman, dan menyampaikan dokumen pengiriman ke satker pengirim							1. ATK 2. Filling Cabinet	1 jam	Surat Jalan/ Dokumen Pengiriman Lainnya	-
4	Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Penatausahaan Persediaan Ketentuan Tambahan: Tanggal BAST Penatausahaan Persediaan tidak boleh kurang dari tanggal BAST Hasil Pekerjaan/dokumen penerimaan hasil pengadaan							Dokumen pengiriman Pc/Laptop Printer	3 jam	<i>Draft</i> BAST Penatausahaan Persediaan	-
5	Mencatat barang persediaan keluar di Kartu Kendali Barang Persediaan sesuai BAST Penatausahaan Persediaan							ATK Artu Kendali Barang Persediaan	1 jam	Kartu Kendali Barang Persediaan yang ter <i>update</i>	-
6	Mencatat barang persediaan keluar pada transaksi transfer keluar online (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan sesuai BAST Penatausahaan Persediaan					->		1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	30 menit	Data transfer keluar yang terinput pada Aplikasi SAKTI	-
7	Memverifikasi transaksi transfer keluar <i>online</i> (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan					Tidak	\rightarrow	1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	10 menit	Data transfer keluar yang terverifikasi/ ditolak	-
8	Melakukan perbaikan penginputan transaksi transfer keluar <i>online</i> (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan						Ya	1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	10 menit	Data inputan transfer keluar yang sudah diperbaiki	-
9	Menyetujui transaksi transfer keluar <i>online</i> (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan						*	1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	5 menit	Data transfer keluar yang terverifikasi	-

		Pelaksana									
		Satker Penerima			Satker Pengirim			– Mutu Baku			ı
No.	Kegiatan	Tim Layanan Gudang/Bagian Umum/ Subbagian Umum	Tim Laporan Persediaan (Operator)	Tim Laporan Persediaan (Approver)	Tim Layanan Gudang/Bagian Umum/ Subbagian Umum	Tim Laporan Persediaan (Operator)	Tim Laporan Persediaan (Approver)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Menyampaikan BAST Penatausahaan Persediaan yang sudah ditandatangani, disertai dengan <i>printout</i> bukti sudah diinput transaksi transfer keluar sesuai dengan BAST Penatausahaan Persediaan							BAST Printout bukti input transfer	15 menit	BAST Penatausahaan Persediaan dan <i>printout</i> bukti input transfer terkirim	-
11	Mencatat barang persediaan masuk di Kartu Kendali Barang Persediaan sesuai BAST Penatausahaan Persediaan	<u> </u>						ATK Kartu Kendali Barang Persediaan	1 jam	Kartu Kendali Barang Persediaan yang ter <i>update</i>	-
12	Mencatat barang persediaan masuk pada transaksi transfer masuk online (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan sesuai BAST Penatausahaan Persediaan		>					1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	30 menit	Data transfer masuk yang terinput pada Aplikasi SAKTI	-
13	Memverifikasi transaksi transfer masuk <i>online</i> (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan		Tidak	\rightarrow				1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	10 menit	Data transfer masuk yang terverifikasi/ ditolak	-
14	Melakukan perbaikan penginputan transaksi transfer masuk <i>online</i> (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan			Ya				1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	10 menit	Data inputan transfer masuk yang sudah diperbaiki	-
15	Menyetujui transaksi transfer masuk <i>online</i> (Sesama SAKTI) di Aplikasi SAKTI Modul Persediaan			→				1. BAST 2. PC/Laptop 3. Jaringan Internet	5 menit	Data transfer masuk yang terverifikasi	-
16	Mengirim satu rangkap BAST Penatausahaan Persediaan yang sudah ditandatangani, disertai dengan <i>printout</i> bukti sudah diinput transaksi transfer masuk sesuai dengan BAST Penatausahaan Persediaan							BAST Printout bukti input transfer	1 jam	BAST Penatausahaan Persediaan dan <i>printout</i> bukti input transfer terkirim	-
17	Menyimpan BAST Penatausahaan dan <i>printout</i> bukti transaksi transfer keluar dan transaksi transfer masuk							Filling Cabinet	5 menit	Arsip BAST dan printout bukti input transfer	-